

# PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK GOOD GOVERNANCE DI DESA BIJI NANGKA KECAMATAN SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI

Ahmad Kamal<sup>1\*</sup>, Muhammadiyah<sup>2</sup>, Fatmawati<sup>3</sup>

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

## Abstract

*The purpose of this study was to find out the implementation and factors through the Village Innovation Exchange in Sinjai Borong District, Sinjai Regency. This study used phenomenology with qualitative research type. The number of research informants was 8 people. Research information was collected through observation, interviews and documentation. Based on the results of research on Reinventing Government through the Village Innovation Exchange in Sinjai Borong District, Sinjai Regency on the principle of catalytic government (Catalytic Government) showed that there were efforts to improve the welfare of rural communities by providing a platform or program that could initiate village businesses in utilizing village funds they had by innovative way. The principle of government owned by the community showed that the community gained knowledge on the basis of their own initiative and the potential of the village so that they Could get additional income. The inhibiting factor was the lack of follow-up from the community after the implementation of the Village Innovation Exchange activities and the existence of differences of opinion regarding village innovation activities.*

**Keywords:** *village fund management, good governance*

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi prinsip reinventing government melalui bursa inovasi desa di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan fenomenologi dengan jenis penelitian kualitatif. Jumlah informan penelitian adalah 8 orang. Informasi penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian tentang Reinventing Government Melalui Bursa Inovasi Desa di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai pada prinsip pemerintah yang katalis (Catalytic Government) menunjukkan terdapat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memberikan wadah atau program yang dapat menginisiasi usaha desa dalam memanfaatkan dana desa yang mereka miliki dengan cara yang inovatif. Dari prinsip pemerintahan milik masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat dapat memperoleh pengetahuan atas dasar inisiatif sendiri dan potensi dari desa sehingga dapat mendapatkan tambahan penghasilan. Faktor penghambat yaitu kurangnya tindak lanjut dari masyarakat setelah pelaksanaan kegiatan Bursa Inovasi Desa dan adanya perbedaan pendapat mengenai kegiatan inovasi desa.

**Kata kunci:** pengelolaan dana desa, good governance

---

\* ahmadkamal@gmail.com

## PENDAHULUAN

Secara umum konsep *reinventing government* bertujuan untuk memperbaiki efisiensi, efektivitas dan kinerja pemerintahan serta memberdayakan masyarakat pada berbagai tingkatan pemerintahan mulai dari pusat, daerah, dan tingkatan pemerintah desa. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya mengubah pola perilaku masyarakat untuk meningkatkan kemampuan serta kemandirian dengan mengenali potensi alam dan masyarakat desa. Oleh karena itu *reinventing government* pada tingkatan pemerintah desa akan memberikan dampak yang besar bagi pemberdayaan masyarakat desa.

Bursa Inovasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dari model pengelolaan inovasi di Tingkat Kabupaten. pelaksanaan Bursa Inovasi Desa yaitu untuk menjembatani kebutuhan pemerintah desa akan solusi bagi penyelesaian masalah, serta inisiatif atau alternatif kegiatan pembangunan desa dalam rangka penggunaan dana desa yang lebih efektif dan inovatif. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang akan dipamerkan dalam Bursa Inovasi Desa yakni kegiatan-kegiatan yang bernilai inovatif dalam pembangunan desa yang

bukan dalam bentuk barang tetapi dalam bentuk ide-ide kreatif yang lahir dan berkembang di desa-desa. Program Inovasi Desa ini dimunculkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan kapasitas desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan desa secara berkualitas.

Kegiatan bursa inovasi desa ini juga dilakukan di Kabupaten Sinjai dimana kegiatan tersebut bertujuan untuk mendiseminasikan informasi pokok terkait penyelenggaraan pengelolaan hibah dana desa untuk mencapai visi daerah dan visi di desa masing-masing dituntut para aparatur desa untuk selalu kreatif, bekerja keras dan berinovasi dan menjadikan wadah bursa inovasi desa menjadi satu-satunya wadah untuk berinovasi di desa. Di Sinjai terdapat salah satu desa yang berhasil menjadi juara ke dua dalam lomba desa pada tingkatan Sulawesi Selatan. Di desa Lamatti Riaja sukses mengembangkan usaha pandai besi untuk menopang ekonomi masyarakat desa.

Melihat upaya pemerintah dalam bursa inovasi desa ini mengarah pada upaya *Reinventing Government* (Osborne dan Gaebler, 1992) yaitu transformasi sistem dan organisasi pemerintah secara fundamental guna

menciptakan peningkatan dramatis dalam efektifitas, efisiensi, dan kemampuan mereka untuk melakukan inovasi. Dengan kata lain mewirauasakan pemerintah agar mampu menciptakan produktifitas masyarakat desa melalui kegiatan bursa inovasi desa di Kabupaten Sinjai.

Reinventing Government mengarahkan pemerintah untuk memberdayakan atau memberi wewenang ketimbang melayani (*empowering rather than serving*). Itu artinya pemerintah berharap kepada rakyatnya agar mampu berdaya sendiri. Dengan kata lain pemerintah bisa memberikan wewenang kepada masyarakat guna menjamin terselenggaranya pelayanan yang efektif dan efisien dan mampu mengelola berbagai sumber pendapatan dari desa secara mandiri.

Oleh karena itu, kelak masyarakat mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dengan kata lain mengembangkan kemampuan masyarakat dari bawah sehingga pemberdayaan masyarakat dapat dicapai oleh pemerintah daerah khususnya di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.

Reinventing dimaknai sebagai penciptaan kembali birokrasi dengan mendasarkan pada sistem wirausaha,

yakni menciptakan organisasi-organisasi dan sistem publik yang terbiasa memperbarui, yang secara berkelanjutan, memperbaiki kualitasnya tanpa harus memperoleh dorongan dari luar. Dengan demikian, reinventing berarti menciptakan sektor publik yang memiliki dorongan dari dalam untuk memperbaiki apa yang disebut dengan “sistem yang memperbarui kembali secara sendiri (Winarno, B. (2004:9).

Menurut Sumartono (2007:10), perspektif NPM dalam prakteknya, sebagai gerakan manajerialis mempunyai pengaruh besar dalam reformasi administrasi publik di berbagai negara maju, seperti Selandia Baru, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Di Inggris, reformasi administrasi publik dijalankan sejak masa PM Margaret Thatcher. Di Amerika Serikat, gerakan ini mendapat dukungan dan komitmen dari Al Gore, wakil presiden Amerika Serikat pada tahun 1993, dengan konsepnya “work better and cost less” (Al Gore, 1993:22).

Kemudian dipopulerkan oleh David Osborne dan Ted Gaebler (1992) melalui karyanya “Reinventing Government”. Gerakan ini menyebar keseluruh dunia sehingga menjadi inspirasi utama di banyak negara dalam mereformasi administrasi publik baik

dengan melakukan privatisasi gaya Inggris ataupun gerakan mewirauasakan birokrasi gaya Amerika Serikat.

Perspektif NPM ini menekankan pada penggunaan mekanisme dan terminologi pasar (market based) yang memandang hubungan antara badan-badan publik (pusat dan daerah) dengan pelanggannya (masyarakat) sebagai layaknya transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli (Suriyani, 2014). Warga masyarakat sebagai penerima manfaat ditempatkan sebagai customer atau konsumen.

Menurut (Osborne dan Gaebler 1992), dalam bukunya “Reinventing Government” memiliki prinsip antara lain: 1) Pemerintah yang katalis (Catalytic Government) artinya adalah pemerintah lebih mengarahkan ketimbang mengayuh (steering rather than rowing). Pemerintah sebagai pengarah bukan pelaksana dalam melayani urusan rakyat. Adapun pelaksana maka diserahkan kepada swasta atau privatisasi, 2) pemerintah milik rakyat (*Community Government*) maksudnya adalah pemerintah memberdayakan atau memberi wewenang ketimbang melayani (*empowering rather than serving*). Itu artinya pemerintah berharap kepada rakyatnya agar mampu berdaya sendiri.

Dengan kata lain pemerintah bisa memberikan wewenang kepada masyarakat guna menjamin terselenggaranya pelayanan yang efektif dan efisien. Kelak mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah. Atau menjadi masyarakat yang mandiri, 3) Pemerintah yang kompetitif (*Competitive Government*) pemerintah akan menjadi pesaing organisasi bisnis lainnya, yang katanya itu adalah hal yang sehat, persaingan sehat. Pemerintahan entrepreneur di dalam berperan sebagai penyedia pelayanan. Harus dilakukan secara kompetitif misalnya harus lebih murah dan lebih cepat agar pelanggan merasa puas. Monopoli pemerintah tidak lagi tepat dan hanya dengan pemberian pelayanan yang kompetitif maka pemerintahan akan lebih efisien, mendorong inovasi (*innovation*) dan merevitalisasi lembaga-lembaga public, 4) *mission-driven government: transforming rule-driven organizations* pemerintah lebih mengutamakan perwujudan misi atau tujuan daripada peran pengaturan, yang memiliki beberapa keunggulan yaitu lebih efisien, lebih efektif, lebih inovatif, lebih fleksibel dan lebih bersemangat tinggi untuk mewujudkan misi dan tujuannya, 5) *result oriented government: funding outcome, not*

*inputs* pemerintahan lebih berorientasi pada hasil. Semua peningkatan dan penambahan sumber-sumber harus diperhitungkan lebih matang agar hasil benar-benar dapat dicapai, tidak sekedar memboroskan sumber-sumber secara membabi buta, 6) *ustomer-driven: meeting the needs of customer, not the bureaucracy* pemerintahan menciptakan sistem pelayanan yang "ramah pelanggan" dan sesuai dengan sebesar mungkin keinginan pelanggan secara holistik. Sehingga pemerintah sebagai pemberi pelayanan selalu peka terhadap kebutuhan dan keinginan pengguna pelayanan, 7) *Enterprising government: earning rather than spending* pemerintahan didorong untuk menggunakan prinsip-prinsip kewirausahaan yang condong berusaha meningkatkan terus pendapatan yang kemudian bisa ditabung untuk menambah investasi dengan cara lebih berorientasi pada keuntungan melalui penggunaan teknik-teknik manajemen yang lebih rasional, 8) *anticipatory government: prevention rather than cure* pemerintahan diharuskan lebih preventif daripada kuratif antisipatif dan proaktif daripada reaktif, berpandangan kedepan dalam proses pembuatan keputusan, mengembangkan arah dan tujuan yang lebih strategis dan dinilai sangat urgen,

9) *ecentralized government: from hierarchy to participation and team work* pemerintahan lebih mengedepankan desentralisasi karena lebih memberikan kesempatan atau pemberdayaan yang dibawah untuk mengembangkan kemampuannya, meningkatkan semangat kerja, lebih mempunyai komitmen yang tinggi terhadap tugas dan organisasinya daripada pemerintahan yang sentralistik, 10) *market oriented government: leveraging change through the market* pemerintahan entrepreneur lebih berorientasi pada pasar daripada strategi birokrasi yang bergaya komando. Sasarannya adalah menyusun dan menstruktur pasar sedemikian rupa dengan mendesain ulang peraturan-peraturan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan publik.

Menurut Ndraha (1990: 234) pengertian resmi tentang desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termaksud di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini juga merupakan suatu pemerintahan yang

mandiri yang berada di dalam sub sistem Pemerintahan Nasional

Menurut Kartasasmita (2001: 213) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.

Latar belakang Bursa Inovasi Desa diawali dengan terbitnya Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa. Salah satu wujud kegiatannya adalah Bursa Inovasi Desa (BID) merupakan sebuah forum penyebaran dan pertukaran inisiatif atau inovasi masyarakat yang berkembang di desa-desa. Kegiatan BID dapat diselenggarakan di tingkat Kabupaten/Kota sebagai kegiatan peluncuran untuk mendukung pelaksanaan inovasi Desa dan di tingkat Kecamatan sebagai wahana pertukaran pengetahuan dan inovasi Desa. BID merupakan bagian tak terpisahkan dari Model Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID) mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa.

Bursa Inovasi Desa merupakan sebuah forum penyebaran dan pertukaran inisiatif atau inovasi masyarakat yang berkembang di Desa-Desa di lingkup Kabupaten. Bursa Inovasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Model Pengelolaan Inovasi di Tingkat Kabupaten. Adapun maksud pelaksanaan Bursa Inovasi Desa yaitu untuk menjembatani kebutuhan pemerintah desa akan solusi bagi penyelesaian masalah, serta inisiatif atau alternatif kegiatan pembangunan desa dalam rangka penggunaan dana desa yang lebih efektif dan inovatif.

Perlu ditekankan bahwa BID merupakan media belajar bagi Desa untuk memperoleh informasi dan kegiatan inovasi yang dapat mendukung pembangunan Desa. BID adalah ajang pertukaran “jual-beli” cara-cara atau solusi yang telah dinilai inovatif, terutama terkait kegiatan pembangunan Desa. BID bukan juga kegiatan pameran barang tapi ideide kreatif dalam pembangunan Desa. BID dilaksanakan untuk membantu Desa dalam meningkatkan kualitas pembangunan melalui pertukaran pengetahuan kegiatan yang inovatif untuk memberi inspirasi dan alternatif pilihan kegiatan bagi pembangunan Desa.

## METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah dengan memperhitungkan *aksesibilitas*, dimana lokasi penelitian mudah untuk dijangkau oleh peneliti, dan memberikan peluang yang cukup karena tidak mungkin hanya diteliti dalam sekali waktu saja. Selain itu realitas yang diteliti masih terus terjadi (berlangsung). Adapun waktu yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian ini dimulai dari bulan April sampai Mei 2019.

Penelitian menekankan pada metode kualitatif, Penelitian kualitatif menjelaskan tentang fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara *holistik* (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2012:6).

Menurut Lofland & Lofland (Moleong, 2012:157) sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai

merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis, melalui perekaman, pengambilan foto atau film.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Sinjai berdasarkan penelusuran sejarah, dimulai dari pemukiman pertama di Wawo Bulu Manipi Kecamatan Sinjai Barat di sebelah timur Malino dipimpin oleh orang yang digelar Puatta Timpae' Tana atai To Pasaja yaitu Arung Manurung Tanralili. Keturunan Arung Tanralili, salah seorang diantaranya adalah wanita yang kemudian puteri Tanralili inilah yang mengembangkan wilayah Wawo Bulu menjadi Kerajaan Turungeng.

Untuk melihat pelaksanaan prinsip *reinventing government* melalui bursa inovasi Desa di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai maka dapat ditelusuri dengan melihat indikator prinsip *Reinventing Government* yang mencakup pemerintah yang katalis (*catalytic government*), pemerintah milik rakyat (*community government*), pemerintah yang kompetitif (*competitive government*), pemerintah yang diarahkan misi (*mission-driven government*), pemerintah yang berorientasi hasil (*result oriented*

government). Untuk lebih jelasnya dapat uraikan sebagai berikut:

### **Pemerintah Yang Katalis (*Catalytic Government*)**

Penelitian ini melihat pemerintah yang katalis (*Catalytic Government*) sebagai arahan pemerintah mengenai program bursa inovasi desa sebagai bentuk insiatif memajukan desa di Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai. Untuk mengetahui arahan pemerintah daerah mengenai bursa inovasi desa maka dilakukan wawancara dengan informan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Kemudian pelaksana dari program Dinas Pemberdayaan masyarakat yang ada di desa dengan tahapan penting dalam pelaksanaan kegiatan tahunan yaitu pelaksanaan Bursa Inovasi Desa (BID). Program yang diinisiasi oleh Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPMD) Taufik Madjid ini merupakan sebuah forum penyebaran dan pertukaran inisiatif atau inovasi masyarakat yang berkembang di desa-desa.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa pemerintah pusat menginisiasi pembangunan desa melalui inovasi bursa desa salah satu caranya yaitu melalui Dokumen Pembelajaran

yang pemilihannya ditentukan oleh pemerintah pusat dan telah dipilih berdasarkan karakteristik desa masing-masing.

Dari penjelasan sejumlah informan dapat dipahami bahwa reinventing goverment dari aspek pemerintah yang katalis (*Catalytic Government*) menunjukkan peran pemerintah dengan adanya arahan pemerintah melalui dokumen pembelajaran yang dipilih pemerintah pusat sebagai bagian dari pembelajaran pada bursa inovasi desa, ini juga adalah bentuk insiatif memajukan desa.

### **Pemerintahan Milik Masyarakat**

Prinsip ini melihat adanya kewenangan pada masyarakat untuk mewedahi menginisiasi sendiri inovasi yang mereka kembangkan di Desa masing-masing. Ciri-ciri dari pemerintahan milik masyarakat adalah masyarakat merima informasi atau pengetahuan baru dari pemerintah sehingga masyarakat dapat meningkatkan kemampuan ekonomi mereka, kemudian ciri yang lain adalah adanya dorongan yang diberikan pemerintah melalui kegiatan yang mengundang partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah seperti pada kegiatan bursa inovasi desa ini.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat dapat memperoleh pengetahuan atas dasar inisiatif sendiri dan potensi dari desa sehingga dapat mendapatkan tambahan penghasilan yang juga dapat meningkatkan perekonomian mereka.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui ada dorongan untuk desa menjadi inovatif dengan memanfaatkan potensi desanya seperti contohnya pemanfaatan lahan yang tidak produktif dapat digunakan untuk menanam sayur-sayuran atau beternak lele yang diinisiasi oleh masyarakat yang ada desa sehingga dapat menjadi contoh desa lainnya.

### **Pemerintahan Yang Kompetitif**

Prinsip ini menunjukkan keterlibatan pemerintah Kabupaten Sinjai dalam memberikan pelayanan sehingga desa dapat menjalin mengembangkan inovasi mereka. Ciri-ciri dari pemerintahan yang kompetitif adalah adanya upaya desain kegiatan yang dapat memotivasi agar tercipta kompetisi yang baik antar desa dan juga memberikan dampak pada munculnya gagasan baru dari desa-desa yang mengikuti kegiatan bursa inovasi desa. Kemudian ciri lainnya adalah selalu ada hal baru yang diperlihatkan pemerintah

kepada masyarakat hal ini bertujuan agar tercipta upaya pemberdayaan dari masyarakat sehingga pemerintah perlu menunjukkan bahwa dengan adanya program bursa inovasi desa dapat menciptakan kompetisi yang positif antara masing-masing desa.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemerintah mendesain sebuah forum untuk menunjukkan pada setiap desa bahwa ada kompetisi dalam mengembangkan potensi desa masing-masing sehingga dapat memberikan pengaruh kepada desa lain untuk berkembang. Forum tersebut dihadiri oleh elemen-elemen tingkat desa seperti anggota BPD, kelompok tani, pemuda desa, pengurus PKK dan tokoh masyarakat.

### **Pemerintah Yang Digerakkan Oleh Misi**

Pemerintah yang digerakkan oleh misi, proses penyampaian misi pemerintah daerah melalui program bursa inovasi desa dapat dilihat dari kesesuaian visi misi kabupaten Sinjai. Untuk mengetahui bursa inovasi desa ini sesuai dengan misi yang dibangun pemerintah Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan program ini memiliki kesesuaian

dengan misi yang rancang oleh Kabupaten Sinjai yang juga memprioritaskan pemberdayaan masyarakat. Adapun misi kabupaten Sinjai yaitu Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya daerah yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dengan tetap berpegang pada kelestarian lingkungan. Misi tersebut berkesesuaian dengan kegiatan Bursa Inovasi Desa.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa misi pemberdayaan yang dituangkan dalam misi kabupaten tidak menjadi acuan utama diselenggaranya Bursa Inovasi Desa namun karena memang program tersebut bersumber dari ide dari pemerintah pusat hanya misi kabupaten yang luas dan umum sehingga dapat mencakup semua bidang termasuk dalam hal pemberdayaan masyarakat.

### **Pemerintah Yang Berorientasi Pada Hasil**

Prinsip ini dilihat dari efektif tidaknya bursa inovasi desa ini dalam pengembangan masyarakat desa yang inovatif dalam merancang pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa hasil bursa inovasi desa ini mendorong desa-desa inovatif seperti peternakan sapi yang menggabungkan teknologi tepat guna memanfaatkan tabung gas 3 kg sebagai bahan bakar pengganti bensin dan solar untuk pompa air.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kemampuan desa untuk mengadopsi hal-hal baru dapat diperoleh melalui kegiatan bursa inovasi desa potensi desa-desa baik itu dibidang pertanian, peternakan, hingga perikanan dapat dimaksimalkan dengan memperoleh pengetahuan melalui bursa inovasi desa yang mendorong semangat untuk belajar dan berkembang membangun desa.

Secara keseluruhan pelaksanaan prinsip reinventing government melalui bursa inovasi desa di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai menunjukkan bahwa dari prinsip pemerintah yang katalis (Catalytic Government) menunjukkan terdapat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memberikan wadah atau program yang dapat menginisiasi usaha desa dalam memanfaatkan dana desa yang mereka miliki dengan cara yang inovatif. Pemerintah pusat menginisiasi pembangunan desa melalui inovasi bursa desa salah satu caranya yaitu

melalui dokumen pembelajaran yang pemilihannya ditentukan oleh pemerintah pusat dan telah dipilih berdasarkan karakteristik desa masing-masing.

Dari prinsip pemerintahan milik masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat dapat memperoleh pengetahuan atas dasar inisiatif sendiri dan potensi dari desa sehingga dapat mendapatkan tambahan penghasilan yang juga dapat meningkatkan perekonomian mereka. ada dorongan untuk desa menjadi inovatif dengan memanfaatkan potensi desanya seperti contohnya pemanfaatan lahan yang tidak produktif dapat digunakan untuk menanam sayur-sayuran atau beternak lele yang diinisiasi oleh masyarakat yang ada desa sehingga dapat menjadi contoh desa lainnya.

Selanjutnya prinsip pemerintahan yang kompetitif menunjukkan bahwa pemerintah mendesain sebuah forum untuk menunjukkan pada setiap desa bahwa ada kompetisi dalam mengembangkan potensi desa masing-masing sehingga dapat memberikan pengaruh kepada desa lain untuk berkembang. Forum tersebut dihadiri oleh elemen-elemen tingkat desa seperti anggota BPD, kelompok tani, pemuda desa, pengurus PKK dan tokoh masyarakat. Kompetisi dapat terjadi

melalui kegiatan bursa inovasi desa ini karena ada penilaian dari mengenai inovasi masing-masing desa dan potensi desa untuk mengembangkan segala sumber daya yang ada di desa dapat didorong dengan adanya forum ini yang dapat berbagi ilmu antar masing-masing desa sehingga melahirkan produk unggulan desa masing-masing.

Dari prinsip pemerintah yang digerakkan oleh misi menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini memiliki kesesuaian dengan misi yang dirancang oleh Kabupaten Sinjai yang juga memprioritaskan pemberdayaan masyarakat. Adapun misi kabupaten Sinjai yaitu Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya daerah yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dengan tetap berpegang pada kelestarian lingkungan. Misi tersebut berkesesuaian dengan kegiatan Bursa Inovasi Desa. Misi pemberdayaan yang dituangkan dalam misi kabupaten tidak menjadi acuan utama diselenggaranya Bursa Inovasi Desa namun karena memang program tersebut bersumber dari ide dari pemerintah pusat hanya misi kabupaten yang luas dan umum sehingga dapat mencakup semua bidang termasuk dalam hal pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya pemerintah yang berorientasi pada hasil menunjukkan bahwa hasil bursa inovasi desa ini mendorong Desa-Desa inovatif seperti peternakan sapi yang menggabungkan teknologi tepat guna memanfaatkan tabung gas 3 kg sebagai bahan bakar pengganti bensin dan solar untuk pompa air. Kemampuan desa untuk mengadopsi hal-hal baru dapat diperoleh melalui kegiatan bursa inovasi desa potensi desa-desa baik itu dibidang pertanian, peternakan, hingga perikanan dapat dimaksimalkan dengan memperoleh pengetahuan melalui bursa inovasi desa yang mendorong semangat untuk belajar dan berkembang membangun desa. Program Inovasi Desa (PID) di mana melalui program ini pemerintah pusat Kementerian Desa telah mendokumentasikan pengalaman inovasi desa lalu mendiseminasikannya melalui kegiatan Bursa Inovasi Desa (BID) sehingga ada pertukaran pengetahuan antar desa.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Reinventing Government Melalui Bursa Inovasi Desa di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Prinsip reinventing government melalui bursa inovasi desa

di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai menunjukkan bahwa dari prinsip pemerintah yang katalis (Catalytic Government) menunjukkan terdapat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memberikan wadah atau program yang dapat menginisiasi usaha desa dalam memanfaatkan dana desa yang mereka miliki dengan cara yang inovatif. Dari prinsip pemerintahan milik masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat dapat memperoleh pengetahuan atas dasar inisiatif sendiri dan potensi dari desa sehingga dapat mendapatkan tambahan penghasilan. Selanjutnya prinsip pemerintahan yang kompetitif menunjukkan bahwa pemerintah mendesain sebuah forum untuk menunjukkan pada setiap desa bahwa ada kompetisi dalam mengembangkan potensi desa masing-masing. Dari prinsip pemerintah yang digerakkan oleh misi menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini memiliki kesesuaian dengan misi yang dirancang oleh Kabupaten Sinjai yang juga memprioritaskan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya pemerintah yang berorientasi pada hasil menunjukkan bahwa hasil bursa inovasi desa ini mendorong Desa inovatif seperti bidang peternakan sapi yang menggabungkan teknologi tepat guna.

Kemampuan desa untuk mengadopsi hal-hal baru dapat diperoleh melalui kegiatan bursa inovasi desa dengan potensi desa masing-masing, 2) Faktor pendukung bursa inovasi desa ini adalah dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah pusat, daerah, desa dan masyarakat. Kemudian beragamnya potensi desa di Kabupaten Sinjai, dan antusiasme masyarakat dalam kegiatan bursa inovasi desa. Namun yang menjadi faktor penghambat yaitu kurangnya tindak lanjut dari masyarakat setelah pelaksanaan kegiatan Bursa Inovasi Desa dan adanya perbedaan pendapat mengenai kegiatan inovasi desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aji, I. (2017). Undang-Undang Desa Sebagai Legitimasi Desa (Desa Dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia). *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 46-62.
- Eko, S. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. FPPD. Yogyakarta.
- Gore, A. (1993). *The Gore report on reinventing government: Creating a government that works better and costs less*. Times Books.
- Kartasmita, Ginandjar. 2001. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta : Pustaka CIDESINDO.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu, 1990, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Osborne, D. G. (1992). *T. Reinventing government, how the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*.
- Riyanto, T. (2015). *Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara*. *Ejournal Administrasi Negara*, 3(1), 199-130.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumartono, Hetifah SJ. (2009) *Inovasi, Partisipasi, Dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif Dan Partisipasi Di Indonesia*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Suparno, A.Suhaenah. 2001. *Pembangunan Desa*. Jakarta Erlangga.
- Suriyani, E. (2014). *Enterpreneurial Government Aparatur Pemerintah Pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan Dan Latihan Kota Banjarmasin*. *Al'ulum*, 61(3).
- Winarno, B. (2004). *Implementasi Konsep Reinventing Government dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 1(2), 1-24.